



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2009

T E N T A N G

SINGKATAN NAMA JABATAN DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa singkatan nama jabatan struktural dan satuan kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan sebutan nama jabatan Struktural yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa untuk keseragaman penyebutan singkatan nama dan satuan kerja perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Singkatan Nama Jabatan dan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINGKATAN NAMA JABATAN DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
- e. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- g. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- h. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara dan membantu Gubernur Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- i. Singkatan adalah singkatan nama jabatan struktural dan nama satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PENULISAN DAN PEMBACAAN SINGKATAN NAMA JABATAN DAN SATUAN KERJA

Pasal 2

Singkatan nama jabatan dan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pemendekan Satuan Nama Jabatan dan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Desember 2009

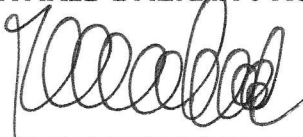
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 37

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2009
TANGGAL 14 DESEMBER 2009**

**SINGKATAN NAMA JABATAN DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	JABATAN DAN SATUAN	SINGKATAN
1	2	3
A.	Gubernur Sumatera Utara	GUBSU
B.	Wakil Gubernur Sumatera Utara	WAGUBSU
C.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	SEKDA PROVSU
D.	Asisten :	AS
	Asisten Pemerintahan	AS. PEM
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	AS. EKBANG
	Asisten Kesejahteraan Sosial	AS. KESSOS
	Asisten Administrasi Umum dan Aset	AS. ADMUSET
E.	Kepala	KA
F.	Biro	RO
	1. Biro Pemerintahan Umum	1. RO PUM
	2. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	2. RO OTDA & KJ
	3. Biro Hukum	3. RO HUK
	4. Biro Organisasi	4. RO ORGANISASI
	5. Biro Perekonomian	5. RO EKON
	6. Biro Administrasi Pembangunan	6. RO ADM BANG
	7. Biro Bina Masyarakat dan Sosial	7. RO BINKESRA
	8. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana	8. RO PPAKB
	9. Biro Umum	9. RO MUM
	10. Biro Keuangan	10. RO KEU
	11. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	11. RO KAPLOLASET

1	2	3
1.	<p>Di lingkungan Biro Pemerintahan Umum :</p> <p>1.1. Bagian Monitoring dan Evaluasi</p> <p> 1.1.1. Sub Bagian Tata Usaha</p> <p> 1.1.2. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi</p> <p> 1.1.3. Sub Bagian Fasilitasi Perselisihan dan Harmonisasi</p> <p>1.2. Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:</p> <p> 1.2.1. Sub Bagian Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat</p> <p> 1.2.2. Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil</p> <p> 1.2.3. Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana</p> <p>1.3. Bagian Kawasan Khusus dan Pertanahan</p> <p> 1.3.1. Sub Bagian Kawasan Sumber Daya Alam Buatan</p> <p> 1.3.2. Sub Bagian Fasilitasi Kawasan Umum</p> <p> 1.3.3. Sub Bagian Pertanahan</p> <p>1.4. Bagian Perangkat Wilayah</p> <p> 1.4.1. Sub Bagian Data Wilayah</p> <p> 1.4.2. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan</p> <p> 1.4.3. Sub Bagian Perbatasan</p>	<p>1. RO PUM</p> <p>1.1. BAG MONEV</p> <p> 1.1.1. SUBBAG TU</p> <p> 1.1.2. SUBBAG PELEV</p> <p> 1.1.3. SUBBAG FASPER HARMON</p> <p>1.2. BAG TRANTIBUM LINMAS</p> <p> 1.2.1. SUBBAG TIB LIN MAS</p> <p> 1.2.2. SUBBAG DUKCAPIL</p> <p> 1.2.3. SUBBAG FPB</p> <p>1.3. BAG KAWASSUS & TANAH</p> <p> 1.3.1. SUBBAG KAWASDAB</p> <p> 1.3.2. SUBBAG FKU</p> <p> 1.3.3. SUBBAG TANAH</p> <p>1.4. BAG RANGWIL</p> <p> 1.4.1. SUBBAG DAWIL</p> <p> 1.4.2. SUBBAG DEKONTUBAN</p> <p> 1.4.3. SUBBAG BATAS</p>

1	2	3
2.	<p>Di lingkungan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama</p> <p>2.1. Bagian Pendapatan Daerah</p> <p>2.1.1. Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>2.1.2. Sub Bagian Pengkajian, Evaluasi Kebijakan dan Kekayaan Daerah</p> <p>2.1.3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah</p> <p>2.2. Bagian Hubungan Pengembangan Daerah</p> <p>2.2.1. Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Penataan Kawasan Daerah</p> <p>2.2.2. Sub Bagian Pengkajian Pengembangan Daerah</p> <p>2.2.3. Sub Bagian Evaluasi Daerah</p> <p>2.3. Bagian Fasilitasi Kerjasama</p> <p>2.3.1. Sub Bagian Pengkajian dan Pelaporan Kerjasama</p> <p>2.3.2. Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Luar Negeri</p> <p>2.3.3. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri</p> <p>2.4. Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah</p> <p>2.4.1. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>2.4.2. Sub Bagian Administrasi Kelengkapan Perangkat Kabupaten/Kota</p> <p>2.4.3. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Urusan Pemerintah</p>	<p>2. RO OTDA & KJ</p> <p>2.1. BAG PENDA</p> <p>2.1.1. SUBBAG TU</p> <p>2.1.2. SUBBAG PEKKEDA</p> <p>2.1.3. SUBBAG EVALAP PENDA</p> <p>2.2. BAG HUBBANGDA</p> <p>2.2.1. SUBBAG HUBLEM PEKADA</p> <p>2.2.2. SUBBAG KAJI BANGANDA</p> <p>2.2.3. SUBBAG EVDA</p> <p>2.3. BAG FAKER</p> <p>2.3.1. SUBBAG KAJI & PELKERMA</p> <p>2.3.2. SUBBAG KPKLN</p> <p>2.3.3. SUBBAG KDN</p> <p>2.4. BAG LENGGARA OTDA</p> <p>2.4.1. SUBBAG LENGGARA PEMDA</p> <p>2.4.2. SUBBAG ADKAP RANG KAB/KOTA</p> <p>2.4.3. SUBBAG ADKEU DAN URPEM</p>

1	2	3
3.	<p>Di lingkungan Biro Hukum</p> <p>3.1 Bagian Penyuluhan Hukum</p> <p>3.1.1. Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>3.1.2. Sub Bagian Sosialisasi dan Informasi Hukum</p> <p>3.1.3. Sub Bagian Pembinaan PPNS</p> <p>3.2. Bagian Perundang-undangan</p> <p>3.2.1. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum</p> <p>3.2.2. Sub Bagian Telaahan dan Pengesahan</p> <p>3.2.3. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum</p> <p>3.3. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah</p> <p>3.3.1. Sub Bagian Pengkajian dan Perumusan</p> <p>3.3.2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan</p> <p>3.4. Bagian Bantuan Hukum</p> <p>3.4.1. Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum</p> <p>3.4.2. Sub Bagian Perlindungan Hak Azasi Manusia</p>	<p>3. RO HUK</p> <p>3.1. BAG PH</p> <p>3.1.1 SUBBAG TU</p> <p>3.1.2 SUBBAG SOSHUK</p> <p>3.1.3 SUBBAG PEMBINAAN PPNS</p> <p>3.2. BAGIAN PUU</p> <p>3.2.1. SUBBAG RANPRO- HUK</p> <p>3.2.2. SUBBAG TE PE</p> <p>3.2.3 SUBBAG DOK PROHUK</p> <p>3.3. BAG FAS PROHUKDA</p> <p>3.3.1. SUBBAG KAMUS</p> <p>3.3.2. SUBBAG PPK</p> <p>3.4. BAG BANHUK</p> <p>3.4.1. SUBBAG SENGKETA BANHUK</p> <p>3.4.2. SUBBAG LINHAM</p>
4.	<p>Di lingkungan Biro Organisasi</p> <p>4.1. Bagian Ketatalaksanaan</p> <p>4.1.1. Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>4.1.2. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dan Pembangunan</p> <p>4.1.3. Sub Bagian Standarisasi dan Pelayanan Umum</p>	<p>4. RO ORGANISASI</p> <p>4.1. BAG TTL</p> <p>4.1.1. SUBBAG TU</p> <p>4.1.2. SUBBAG T.P.P.</p> <p>4.1.3. SUBBAG STAN YANMUN</p>

	<p>4.2 Bagian Kelembagaan</p> <p>4.2.1. Sub Bagian Penataan Kelembagaan Provinsi</p> <p>4.2.2. Sub Bagian Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/Kota</p> <p>4.2.3. Sub Bagian Data dan Evaluasi</p> <p>4.3. Bagian Analisa Jabatan</p> <p>4.3.1. Sub Bagian Analisa Jabatan Struktural</p> <p>4.3.2. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional</p> <p>4.3.3. Sub Bagian Perpustakaan</p> <p>4.4. Bagian Akuntabilitas Kinerja</p> <p>4.4.1. Sub Bagian Perencanaan Kinerja</p> <p>4.4.2. Sub Bagian Pengukuran Kinerja</p> <p>4.4.3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja</p>	<p>4.2. BAG KEL</p> <p>4.2.1. SUBBAG TAKELPROV</p> <p>4.2.2. SUBBAG DALKEL KAB/ KOTA</p> <p>4.2.3. SUBBAG DAEVA</p> <p>4.3. BAG ANJAB</p> <p>4.3.1. SUBBAG ANJABRAL</p> <p>4.3.1. SUBBAG ADJABSIONAL</p> <p>4.3.3. SUBBAG PERPUS</p> <p>4.4. BAG AKUNKIN</p> <p>4.4.1. SUBBAG RENKIN</p> <p>4.4.2. SUBBAG KURKIN</p> <p>4.4.3. SUBBAG EVALAPKIN</p>
--	--	---

5.	Di lingkungan Biro Perekonomian	5. RO EKON
5.1.	Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam	5.1. BAG BANGAN SDA
5.1.1	Sub Bagian Tata Usaha	5.1.1. SUBBAG TU
5.1.2.	Sub Bagian Sumber Energi/Mineral Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.1.2. SUBBAG SUMTAN LH
5.1.3.	Sub Bagian Fasilitas dan Pembinaan BUMD	5.1.2. SUBBAG TASIBIN BUMD
5.2.	Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Daerah	5.2. BAG BANGAN USED
5.2.1.	Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	5.2.1. SUBBAG DAYA EKONKRA
5.2.2.	Sub Bagian Bina Penanggulangan Kemiskinan	5.2.2. SUBBAG BINLANEKIN
5.2.3.	Sub Bagian Hubungan Lembaga dan Informasi Harga	5.2.3. SUBBAG HUBLEM & INHAR
5.3.	Bagian Pengembangan Distribusi, Industri dan Perdagangan	5.3. BAG BANG DISTRINGAN
5.3.1.	Sub Bagian Perdagangan dan Industri	5.3.1. SUBBAG DAGTRI
5.3.2.	Sub Bagian Transportasi, Telekomunikasi dan Pariwisata	5.3.2. SUBBAG TRANSTEL SATA
5.3.3.	Sub Bagian Promosi dan Perlindungan Konsumen	5.3.3. SUBBAG PROLINMEN
5.4.	Bagian Pengembangan Produksi	5.4. BAG BANGPRO
5.4.1.	Sub Bagian Produksi, Pemasaran Agro-Bisnis Perkebunan dan Pertanian	5.4.1. SUBBAG PPAPP
5.4.2.	Sub Bagian Perikanan dan Peternakan	5.4.2. SUBBAG KANTERNAK
5.4.3.	Sub Bagian Sarana Produksi dan Pengembangan Pangan	5.4.3. SUBBAG SPPP

<p>6.</p>	<p>Di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan</p> <p>6.1. Bagian Evaluasi Pembangunan</p> <p>6.1.1. Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>6.1.2. Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan</p> <p>6.1.3. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi</p> <p>6.2. Bagian Bina Usaha Jasa</p> <p>6.2.1. Sub Bagian Penyatuan dan Pemberdayaan</p> <p>6.2.2. Sub Bagian Pengawasan</p> <p>6.2.3. Sub Bagian Jaringan Aspirasi Masyarakat Jasa Konstruksi</p> <p>6.3. Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>6.3.1. Sub Bagian Analisa Program Pembangunan.</p> <p>6.3.2. Sub Bagian Sosial Budaya dan Ekonomi</p> <p>6.3.3. Sub Bagian Fisik dan Prasarana</p>	<p>6. RO ADM BANG</p> <p>6.1. BAG EVABANG</p> <p>6.1.1. SUBBAG TU</p> <p>6.1.2. SUBBAG PHP</p> <p>6.1.3. SUBBAG DATEVA</p> <p>6.2. BAG BINUJA</p> <p>6.2.1. SUBBAG TUDAYA</p> <p>6.2.2. SUBBAG WAS</p> <p>6.2.3. SUBBAG JASMA JASTRUKSI</p> <p>6.3. BAG DALAKBANG</p> <p>6.3.1. SUBBAG ANPROBANG</p> <p>6.3.2. SUBBAG SOSBUD EKON</p> <p>6.3.3. SUBBAG FIPRA</p>
<p>7.</p>	<p>Di lingkungan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial</p> <p>7.1. Bagian Kesehatan dan Tenaga Kerja</p> <p>7.1.1. Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>7.1.2. Sub Bagian Kebudayaan</p> <p>7.1.3. Sub Bagian Tenaga Kerja</p> <p>7.2. Bagian Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga</p> <p>7.2.1. Sub Bagian Pendidikan</p> <p>7.2.2. Sub Bagian Kebudayaan</p> <p>7.2.3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga</p>	<p>7. RO BINKESRA</p> <p>7.1. BAG KESNAKER</p> <p>7.1.1. SUBBAG TU</p> <p>7.1.2. SUBBAG BUDAYA</p> <p>7.1.3. SUBBAG NAKER</p> <p>7.2. BAG DIK BUDAMORA</p> <p>7.2.1. SUBBAG DIDIK</p> <p>7.2.2. SUBBAG BUDAYA</p> <p>7.2.3. SUBBAG MUDORA</p>

1	2	3
	<p>7.3. Bagian Pembinaan Sosial</p> <p>7.3.1 Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spritual</p> <p>7.3.2. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>7.3.3. Sub Bagian Bbantuan dan Rehabilitasi</p> <p>7.4. Bagian Pembinaan Kehidupan Beragama</p> <p>7.4. 1. Sub Bagian Bina Kerukunan Beragama</p> <p>7.4.2. Sub Bagian Bantuan dan Kegiatan Keagamaan</p> <p>7.4.3. Sub Bagian Fasilitasi Urusan Haji</p>	<p>7.3. BAG BINSOS</p> <p>7.3.1. SUBBAG BINA MENTAL</p> <p>7.3.2. SUBBAG KESMAS</p> <p>7.3.3. SUBBAG BANREH</p> <p>7.4. BAG BINDURAG</p> <p>7.4.1. SUBBAG BINRUGA</p> <p>7.4.2. SUBBAG TUGIGA</p> <p>7.4.3. SUBBAG FASIURHAJ</p>
8.	<p>Di lingkungan Biro Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB</p> <p>8.1. Bagian Pengarusutamaan Gender</p> <p>8.1.1 Sub Bagian Gender</p> <p>8.1.2. Sub Bagian Fasilitasi Gender</p> <p>8.2. Bagian Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>8.2.1. Sub Bagian Perlindungan Perempuan</p> <p>8.2.2. Sub Bagian Fasilitasi Gender</p> <p>8.3. Bagian Perlindungan dan Kesejahteraan Anak</p> <p>8.3.1. Sub Bagian Perliindungan Anak</p> <p>8.3.2. Sub Bagian Kesejahteraan Anak</p> <p>8.4. Bagian Keluarga Sejahtera dan Berencana</p> <p>8.4.1. Sub Bagian Pemberdayaan Keluarga Sejahtera</p> <p>8.4.2. Sub Bagian Fasilitasi Keluarga Berencana</p>	<p>8. RO PPAKB</p> <p>8.1. BAG TAMA GENDER</p> <p>8.1.1. SUBBAG GENDER</p> <p>8.1.2. SUBBAG FASI GENDER</p> <p>8.2. BAG DUNGAN DAN KHP</p> <p>8.2.1. SUBBAG PP</p> <p>8.2.2. SUBBAG FASGENDER</p> <p>8.3 BAG DUNGAN DAN KESRANAK</p> <p>8.3.1. SUBBAG DUNGANAK</p> <p>8.3.2. SUBBAG KESRANAK</p> <p>8.4. BAG GATERECANA</p> <p>8.4.1. SUBBAG DAYAKELTERA</p> <p>8.4.2. SUBBAG FASI KB</p>

1	2	3
9	<p>Dilingkungan Biro Umum</p> <p>9.1. Bagian Arsip dan Tata Usaha</p> <p>9.1.1. Sub Bagian Tata Usaha</p> <p>9.1.2. Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi Sekretariat</p> <p>9.1.3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan</p> <p>9.2. Bagian Rumah Tangga</p> <p>9.2.1. Sub Bagian Pengelolaan Mess, Gedung dan Taman</p> <p>9.2.2. Sub Bagian Kendaraan dan Urusan dalam</p> <p>9.2.3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan</p> <p>9.3. Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan</p> <p>9.3.1 Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat</p> <p>9.3.2 Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat</p> <p>9.3.3 Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pengawai</p> <p>9.4 Bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan Telekomunikasi</p> <p>9.4.1 Sub Bagian Humas Pimpinan dan kemitraan</p> <p>9.4.2 Sub Bagian Keprotokolan, Acara dan Perjalanan</p> <p>9.4.3 Sub Bagian Telekomunikasi, Persandian dan Pengolahan Data</p>	<p>9. RO MUM</p> <p>9.1. BAG ARTU</p> <p>9.1.1. SUBBAG TU</p> <p>9.1.2. SUBBAG RUSURAT DAN EKSPEDISET</p> <p>9.1.3. SUBBAG TUPIM</p> <p>9.2. BAG RT</p> <p>9.2.1. SUBBAG LOLAMGET</p> <p>9.2.2. SUBBAG DARA URDAL</p> <p>9.2.3. SUBBAG RTPIM</p> <p>9.3. BAG TUPEG KEU</p> <p>9.3.1. SUBBAG ADPEGSET</p> <p>9.3.2. SUBBAG ADKEUSET</p> <p>9.3.3. SUBBAG DAYA DAN TERAPEG</p> <p>9.4 BAG HUMPINTOKOL DAN TELKOM</p> <p>9.4.1. SUBBAG HUMPINTRA</p> <p>9.4.2. SUBBAG TOKOL DAN ARJAN</p> <p>9.4.3. SUBBAG TELSANDI DAN LAHTA</p>

10.	Biro Keuangan	10. RO. KEU
	10.1 Bagian Perbendaharaan	10.1. BAG DAHARA
	10.1.1. Sub Bagian Tata Usaha	10.1.1 SUBBAG TU
	10.1.2. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan,	10.1.2 SUBBAG DAHARA BETI SUNG DAN BIAYA
	10.1.3. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Langsung	10.1.3 SUBBAG DAHARA BELSUNG
	10.2 Bagian Anggaran	10.2 BAG RAN
	10.2.1. Sub Bagian Anggaran Tidak Langsung	10.2.1 SUBBAG RAN TISUNG
	10.2.2. Sub Bagian Anggaran Belanja Langsung	10.2.2 SUBBAG RAN BELSUNG
	10.2.3. Sub Bagian Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan	10.2.3 SUBBAG RAN PENDAYAN
	10.3. Bagian Kas daerah	10.3 BAG KASDA
	10.3.1. Sub Bagian Penerimaan Kas	10.3.1 SUBBAG MANKAS
	10.3.2. Sub Bagian Pengeluaran Kas	10.3.2. SUBBAG LUARANKAS
	10.3.3. Sub Bagian Pengendalian Kas Bank dan Pajak	10.3.3. SUBBAG DALI KASBANK DAN PAJAK
	10.4 Bagian Akuntansi	10.4 BAG AKUNTANSI
	10.4.1. Sub Bagian Akuntansi Penerimaan	10.4.1. SUBBAG AKUNPENMAN
	10.4.2. Sub Bagian Akuntansi Pengeluaran	10.4.2. SUBBAG AKUNPEL
	10.4.3. Sub Bagian Evaluasi Neraca dan Arus Kas	10.4.3. SUBBAG ENAKAS
	10.5 Bagian Pembiayaan Anggaran Kabupaten dan Kota	10.5. BAG PEMRANKABKOT
	10.5.1. Sub Bagian I Evaluasi APBD Kab/Kota	10.5.1. SUBBAG I EVAPBD KABKOT
	10.5.2. Sub Bagian II Evaluasi APBD Kab/Kota	10.5.2. SUBBAG II EVAPBD KABKOT
	10.5.3. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	10.5.3. SUBBAG PEMBAD KEUDA

1	2	3
11.	Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset 11.1. Bagian Pengadaan 11.1.1 Sub Bagian Tata Usaha 11.1.2 Sub Bagian Standarisasi dan Harga 11.1.3 Sub Bagian Pembelian 11.2. Bagian Analisa kebutuhan dan Pengelolaan Aset 11.2.1 Sub Bagian Analisa Kebutuhan 11.2.2 Sub Bagian Pengelolaan Aset 11.2.3 Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan 11.3. Bagian Distribusi , Penyimpanan dan Penghapusan 11.3.1 Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan 11.3.2 Sub Bagian Penghapusan 11.4. Bagian Perawatan 11.4.1. Sub Bagian Perawatan Gedung Kantor dan Mess/Pasanggrahan 11.4.2. Sub Bagian Barang Inventaris	11 RO KAPLOLASET 11.1 BAG DAAN 11.1.1 SUBBAG TU 11.1.2 SUBBAG STANDARGA 11.1.3 SUBBAG PEMBELIAN 11.2. BAG ANBUT LOLASET 11.2.1. SUBBAG ANBUD 11.2.2. SUBBAG PENGLOLASET 11.2.3. SUBBAG DAEVALAP 11.3 BAG DISTRIBUSI PAN-HAPUS 11.3.1. SUBBAG DISTRIBUSI PAN 11.3.2. SUBBAG PENGHAPUSAN 11.4. BAG PERAWATAN 11.4.1. SUBBAG PGK DAN MES 11.4.2. SUBBAG BARANG TARIS
12.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat : 12.1 Bagian Umum 12.1.1 Sub Bagian Tata Usaha 12.1.2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian 12.1.3. Sub Bagian Rumah Tangga dan perawatan 12.2. Bagian Keuangan 12.2.1. Sub Bagian Anggaran 12.2.2. Sub Bagian Verifikasi 12.2.3. Sub Bagian Pembukuan	12. SEKWAN 12.1 BAG MUM 12.1.1. SUBBAG TU 12.1.2. SUBBAG KAPTRIBUSI 12.1.3. SUBBAG RT DAN PERAWATAN 12.2. BAG KEU 12.2,1 SUBBAG RAN 12.2.2. SUBBAG VERIFIKASI 12.2.3. SUBBAG BUKU

1	2	3
	<p>12.3. Bagian Persidangan dan Risalah</p> <p>12.3.1. Sub Bagian Persidangan Pimpinan dan Paripurna DPRD</p> <p>12.3.2. Sub Bagian Persidangan, Komisi dan Fraksi DPRD</p> <p>12.3.3. Sub Bagian Risalah dan Panitia DPRD</p> <p>12.4. Bagian Informasi dan Protokol</p> <p>12.4.1. Sub Bagian Informasi</p> <p>12.4.2. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga</p> <p>12.4.3. Sub Bagian Pelayanan masyarakat dan Aspirasi</p> <p>12.5. Bagian Hukum dan Perundang-undangan</p> <p>12.5.1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Rancangan Perda</p> <p>12.5.2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum</p> <p>12.5.3. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi</p>	<p>12.3. BAG SIDANG DAN RISALAH</p> <p>12.3.1. SUBBAG PPP DPRD</p> <p>12.3.2. SUBBAG PKF DPRD</p> <p>12.3.3. SUBBAG RISALAH DAN PANITIA DPRD</p> <p>12.4. BAG INPRO</p> <p>12.4.1. SUBBAG INFORMASI</p> <p>12.4.2. SUBBAG PROHUBANLEM</p> <p>12.4.3. SUBBAG YANMASA</p> <p>12.5. BAG HUKDANG</p> <p>12.5.1. SUBBAG UU RANPERDA</p> <p>12.5.2. SUBBAG SUNPROHUK</p> <p>12.5.3. SUBBAG JIANEVA</p>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN